

Judul : Pansus RUU PKS diusulkan
Tanggal : Kamis, 01 Februari 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

Pansus RUU PKS Diusulkan

JAKARTA — Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di-kawatirkan tumpang tindih dengan pembahasan RUU KUHP yang saat ini tengah digodok Komisi III DPR. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Siti Mufattahah, mengatakan, dewan perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk menghindari hal itu.

"Kemarin saya sempat sampaikan, kalau bisa, ini dibuat pansus. Karena, kalau kita ingin fokus mau membidanakan berkaitan dengan hukumnya kita perbesar atau perdalam maka perlu kita libatkan Komisi III," ujar Mufattahah pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan ormas lintas agama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Menurut Mufattahah, dengan melibatkan Komisi III, pihak-pihak yang berkewajiban menanggapi persoalan tersebut bisa bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi suatu pelanggaran sehingga ke depannya tidak saling tuding.

Senada dengan Mufattahah, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, juga menyetujui usulan tersebut. "Mungkin bisa lebih baik ketika masuk ke dalam pansus, jadi saya setuju juga. Karena kebetulan KUHP-nya lagi dalam pembahasan, jadi kita bisa bahas *bareng* beberapa poin-poin yang ada juga di undang-undang ini," kata Rieke.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, usulan tersebut baru kali ini disampaikan oleh para anggota dengan alasan agar ada pembahasan lebih komprehensif. Anggota Fraksi PKB tersebut mengungkapkan, Komisi VIII tidak ingin didesak oleh pihak-pihak lain dengan adanya kebutuhan UU.

"Kalau undang-undang sudah jadi, jangan membuka kepada pihak-pihak lain untuk bermain-main dengan undang-undang. Mestinya UU ini merangkum dan mengunci. Ini merangkum juga tidak bisa, mengunci juga tidak bisa. Itu berbahaya," ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher juga menanggapi adanya usulan tersebut. Ia mengatakan, belum ada rencana serius terkait usulan pembentukan pansus dalam pembahasan RUU PKS tersebut.

Mengenai adanya kekhawatiran tumpang tindih dengan undang-undang lain, Ali berharap RUU PKS tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, seperti Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perkawinan. "Kan sebagian sudah diatur dalam undang-undang itu," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain usulan pembentukan pansus, beberapa anggota Komisi VIII DPR meminta judul RUU PKS diubah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengaku masih menampung masukan dari berbagai pihak.

"Ada dua hal pertanyaan tentang judul. Judulnya itu *kan* Penghapusan Kekerasan Seksual. Pertanyaan pertama, judul itu belum titik. Karena ini tidak titik, maka akibatnya banyak. Kalau dilakukan suka sama suka, pasti tidak bagian dari pidana," katanya.

Pertanyaan kedua, Marwan melanjutkan, dalam naskah akademis yang menjadi tugas Komisi VIII, ada rumusan definisi tentang kekerasan yang terangkum di dalam empat poin yang dinilai juga bermasalah. Empat poin tersebut selain akan semakin membuka persoalan juga tidak bisa mencegah hal yang lain. ■ febrianto adi saputro **ed:** eh ismail